



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017



DINAS KOMUNIKAS, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULELENG 2017



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnyalah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD tahun 2012-2017 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017, yang mencakup periode tahunan. RKT ini menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng ini masih jauh dari sempurna, untuk itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan, demi perbaikan dan penyempurnaannya. Dan semoga RKT ini dapat bermanfaat untuk pengembangan dan kemajuan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian di Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 14 Februari 2017

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Buleleng



Dr. Drs. I Ketut Suweca, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620608 198203 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
Bab II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	5
2.1. Sasaran Strategis	5
2.2. Program	7
2.3. Kegiatan	8
Bab III PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan struktur organisasinya terdiri atas Sekretariat, dan lima bidang, yaitu: Bidang Pengelolaan Dan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Bidang Layanan E-Government, dan Bidang Persandian.

Dalam Peraturan Bupati No. 75 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang harus dipedomani dan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

a. Tugas pokok

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, Informatika dan bidang Persandian;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis tahun 2012-2017 dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 ini adalah:

1. Tersusunnya rencana kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang akan dilaksanakan pada tahun 2017;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, penyajian Renja SKPD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKT Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, landasan hukum yang digunakan untuk penyusunannya, maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen ini dan sistematika penulisan dokumen RKT ini.

Bab II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Pada bagian ini dijelaskan mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng, program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini disampaikan catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2.1. Sasaran Strategis

Sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng tahun 2012-2017, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ingin dicapai, yang merupakan rumusan dari isu-isu strategis yang dihadapi di bidang komunikasi, informatika dan bidang persandian. Ketiga sasaran strategis tersebut yaitu:

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi publik ke masyarakat
2. Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng
3. Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng

Dari ketiga sasaran strategis yang ingin dicapai ini, kemudian disusunlah sasaran program yang memberikan penjabaran yang lebih jelas dari sasaran strategis tersebut di atas, yaitu:

1. Terkelolanya isu dan tema di masyarakat dengan baik

Saat ini selalu saja ada isu ataupun tema publik yang menjadi pembicaraan/pembahasan di masyarakat. Isu atau tema inilah yang jika dibiarkan menyebar secara liar, tanpa ada pengawasan ataupun pengarahan dari pemerintah dapat berakibat terjadinya konflik di masyarakat, baik yang masih dalam tingkatan konflik non fisik sampai dengan konflik fisik yang melibatkan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Buleleng. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan langkah-langkah persuasif melalui tatap muka, sosialisasi, ceramah, dialog, maupun siaran keliling. Indikator dari sasaran ini adalah:

- a. Persentase konflik di masyarakat akibat isu dan tema yang dapat diselesaikan, dengan target 100%
2. Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat seluas-luasnya

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah akan tidak dapat diketahui oleh masyarakat jika pembangunan tersebut tidak dapat disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan penyebarluasan informasi pembangunan daerah yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan, sehingga selain masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan oleh

pemerintah daerah, masyarakatpun dapat ikut serta dalam proses pembangunan tersebut dan juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik dan transparan. Yang menjadi indikator dari sasaran ini adalah:

- a. Persentase gugatan informasi publik antara masyarakat dan pemerintah yang dapat diselesaikan dengan baik, dengan target sebesar 100%.

3. Handalnya jaringan online Pemkab Buleleng

Salah satu komponen penting dan mendasar dari penerapan e-government adalah ketersediaan jaringan komunikasi data (jaringan online) yang saling menghubungkan seluruh instansi pemerintah daerah, sehingga memudahkan dalam komunikasi data dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan juga kajian-kajian yang digunakan untuk mengembangkan teknologi yang digunakan dalam komunikasi data tersebut. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah:

- a. Persentase gangguan pada jaringan online yang dapat diatasi, dengan target capaian sebesar 100%.
- b. Persentase kajian pengembangan TIK yang diterapkan dengan baik, dengan target capaian sebesar 100%.

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan e-government. Tanpa adanya SDM yang handal di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), maka sebaik apa pun sistem yang digunakan dan setinggi apa pun teknologi yang diterapkan, maka tidak akan berjalan secara optimal. Untuk itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kapasitas SDM di bidang TIK. Indikator dari sasaran ini adalah:

- a. Persentase keberhasilan pelatihan bidang TIK, dengan target capaian sebesar 100%.

5. Terintegrasinya aplikasi pemerintah daerah dalam dalam satu portal aplikasi layanan pemerintah daerah

Sistem informasi atau aplikasi yang dijalankan melalui jaringan online yang dimiliki, ibarat mobil yang dijalankan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga semakin baik teknologi yang digunakan dalam mobil tersebut, maka semakin cepat dan tepatlah ia berjalan, demikian pulalah

dengan sistem informasi atau aplikasi. Selain itu juga, juga dibutuhkan komunikasi yang baik antar sistem agar data/informasi yang dihasilkan satu sama lain dapat sama. Untuk itu perlu dilakukan integrasi sistem/aplikasi milik pemerintah daerah, sehingga kesemua sistem/aplikasi ini dapat saling bertukar data. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah:

- a. Persentase aplikasi milik pemerintah daerah yang terintegrasi dengan baik, dengan target capaian sebesar 33,33%.
6. Terjaminnya keamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif bagi kemajuan peradaban manusia, namun juga memberikan dampak negatif bagi manusia, karena jika disalahgunakan dapat memberikan kerugian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu perlu dilakukan pengamanan komunikasi dan informasi terdapat orang-orang penting pemerintah daerah (vvip), tempat-tempat penting milik pemerintah daerah, maupun kegiatan-kegiatan penting yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sehingga segala proses kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan aman. Indikator yang digunakan dalam sasaran ini adalah:

- a. Persentase terlaksananya pengamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting milik Pemkab Buleleng, dengan target capaian sebesar 100%.

2.2. Program

Dalam usaha untuk mencapai sasaran-sasaran program yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian melaksanakan 7 Program utama yang mendukung pencapaian sasaran strategis dinas. Program-program tersebut adalah:

- a. Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Program ini untuk mencapai sasaran 1, yaitu: Terkelolanya isu dan tema di masyarakat dengan baik. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik.

- b. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Program ini untuk mencapai sasaran 2, yaitu: Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah kepada masyarakat seluas-luasnya. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik.

c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Program ini untuk mencapai sasaran 3, yaitu: Handalnya jaringan online Pemkab Buleleng. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

d. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Program ini juga untuk mencapai sasaran 3, yaitu: Handalnya jaringan online Pemkab Buleleng. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

e. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

Program ini untuk mencapai sasaran 4, yaitu: Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

f. Program Pengelolaan Layanan e-Government

Program ini juga untuk mencapai sasaran 5, yaitu: Terintegrasinya aplikasi pemerintah daerah dalam dalam satu portal aplikasi layanan pemerintah daerah. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Layanan e-Government.

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini juga untuk mencapai sasaran 6, yaitu: Terjaminnya keamanan komunikasi dan informasi pada kegiatan dan fasilitas penting. Bidang yang melaksanakan program ini adalah Bidang Persandian.

2.3. Kegiatan

Dari program-program tersebut di atas, maka dijabarkan dalam 29 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data opini publik
- b. Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral
- c. Pelayanan Informasi Publik
- d. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- e. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- f. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
- g. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Peliputan dan Dokumentasi
- h. Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa
- i. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok komunikasi Sosial Masyarakat
- j. Pemberdayaan dan Penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik
- k. Penyediaan Layanan Akses Internet
- l. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak
- m. Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi
- n. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- o. Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi
- p. Pengumpulan dan Pengolahan Data
- q. Pengembangan dan Pengelolaan Data Center
- r. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
- s. Pengelolaan dan Fasilitas Pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informasi
- t. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- u. Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- v. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain
- w. Pembinaan dan Pengembangan Situs resmi Pemerintah Daerah
- x. Pengkajian dan Pengembangan Implementasi e-Government
- y. Peningkatan kapasitas aparatur dan Sertifikasi teknis bidang TIK
- z. Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi
- aa. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
- bb. Pengelolaan Sumber Daya Persandian
- cc. Pembinaan dan Pengembangan SDM bidang persandian

Untuk melihat secara keseluruhan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
TAHUN 2017

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN			Ket.
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran (Output)	Target/Satuan	
1	2	3	4	5	6	8	9
1 Meningkatnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat	1 Persentase SKPD yang mendapatkan gugatan informasi dari masyarakat	0%	1 Program Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	1 Pengumpulan dan pengolahan data opini publik	1 Jumlah laporan hasil monitoring opini publik di media cetak dan sosial media	12 dokumen	
					2 Waktu pengelolaan kritik saran di situs resmi Pemkab Buleleng	12 bulan	
				2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Tema Komunikasi Publik Lintas Sektoral	1 Jumlah pelaksanaan dialog dan sosialisasi terkait tema publik	12 bulan	
					2 Waktu pelaksanaan monitoring tema publik baik lokal maupun nasional	12 kali	
				3 Pelayanan Informasi Publik	1 Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui siaran keliling yang dilaksanakan	60 kali	
					2 Jumlah kegiatan pelayanan multi media yang dilaksanakan	50 kali	

1	2	3	4	5	6	8	9
					3 Waktu pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat melalui hotline sms	12 bulan	
			2 Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media	1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1 Jumlah edisi penerbitan majalah Singa Manggala	2700 oplah	
					2 Jumlah brosur/leaflet/pamflet yang dicetak	1000 lembar	
				2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Lama waktu pelaksanaan pameran pembangunan Kabupaten Buleleng	14 hari	
					2 Lama waktu yang difasilitasi untuk mengikuti Pameran Pembangunan Propinsi Bali	10 hari	
				3 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	1 Jumlah pelaksanaan kesenian tradisional untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah	3 kali	
				4 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Peliputan dan Dokumentasi	1 Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang diliput dan didokumentasikan	240 kali	
				5 Pengembangan Kerjasama dengan Media Massa	1 Jumlah press release yang dikeluarkan	240 kali	

1	2	3	4	5	6	8	9
					2 Jumlah konferensi pers yang diselenggarakan	2 kali	
					3 Jumlah pelaksanaan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik	104 kali	
				6 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok komunikasi Sosial Masyarakat	1 Jumlah pelaksanaan sosialisasi tentang KIM	9 lokasi	
					2 Jumlah anggota KIM yang mengikuti pelatihan internet	30 orang	
				7 Pemberdayaan dan Penyediaan akses Informasi Media dan Lembaga Komunikasi Publik	1 Jumlah orang yang mengikuti pelatihan jurnalistik	25 orang	
2 Meningkatnya penerapan e-government di Pemkab Buleleng	1 Persentase SKPD yang menerapkan e-Government sesuai standar	100%	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1 Penyediaan Layanan Akses Internet	1 Waktu penyediaan akses internet bagi instansi pemerintah	12 bulan	
					2 Jumlah titik layanan free hotspot untuk masyarakat	8 titik	
					3 Waktu pelayanan media center	12 bulan	
				2 Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan piranti lunak	1 Jumlah instansi yang dibina dan diawasi pemanfaatan piranti lunak legalnya	40 instansi	

1	2	3	4	5	6	8	9	
				3 Pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi	1 Jumlah jaringan online yang terbina	140 titik		
				4 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1 Waktu pengelolaan dan pengamanan server	12 bulan		
					2 Waktu monitoring dan pengawasan pemanfaatan jaringan internet	12 bulan		
			2 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Pengkajian dan Penelitian bidang informasi dan komunikasi	1 Jumlah dokumen kajian pengembangan dan inovasi TIK	1 dokumen		
					2 Pengumpulan dan Pengolahan Data	1 Jumlah jenis data yang dikumpulkan dan diolah	4 jenis data	
					3 Pengembangan dan Pengelolaan Data Center	1 Waktu penyediaan dan pelayanan data center Pemkab Buleleng	12 bulan	
			3 Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	1 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	1 Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pemanfaatan sistem informasi pemerintah	390 orang		
					2 Pengelolaan dan Fasilitas Pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informasi	1 Waktu pengelolaan dan pelayanan lab pelatihan komputer	12 bulan	

1	2	3	4	5	6	8	9
			4 Program Pengelolaan Layanan e-Government	1 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Waktu pengelolaan LPSE	12 bulan	
				2 Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Jumlah aplikasi pemerintah yang diimplementasikan	1 aplikasi	
					2 Jumlah aplikasi pemerintah yang dimonitor pemanfaatannya	30 aplikasi	
				3 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	1 Waktu monitoring nama domain dan subdomain yang ada di lingkup Pemkab Buleleng	12 bulan	
					2 Jumlah proses pendaftaran nama domain dan sub domain yang dilaksanakan	10 kali	
				4 Pembinaan dan Pengembangan Situs resmi Pemerintah Daerah	1 Jumlah sub domain pada situs resmi Pemkab Buleleng yang terkelola dengan baik	49 sub domain	
				5 Pengkajian dan Pengembangan Implementasi e-Government	1 Jumlah regulasi terkait implementasi e-government yang diterbitkan	1 regulasi	
					2 Jumlah dokumen kerjasama dalam bidang e-government yang diterbitkan	2 dokumen	

1	2	3	4	5	6	8	9
				6 Peningkatan kapasitas aparatur dan Sertifikasi teknis bidang TIK	1 Jumlah tenaga teknis bidang TIK yang mengikuti pelatihan	4 orang	
3 Meningkatnya penerapan pengamanan komunikasi dan informasi Pemkab Buleleng	1 Persentase keamanan komunikasi dan informasi di Pemkab Buleleng	100%	1 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1 Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Komunikasi Sandi	1 Jumlah pengamanan persandian yang dilakukan dengan baik	6 kali	
					2 Waktu pengelolaan SOC	12 bulan	
				2 Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian	1 Jumlah dokumen laporan pelaksanaan persandian yang dihasilkan tepat waktu	12 dokumen	
				3 Pengelolaan Sumber Daya Persandian	1 Jumlah dokumen kebijakan terkait pengamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	1 dokumen	
					2 Jumlah peralatan persandian yang dirawat dan siap pakai	36 unit	
				4 Pembinaan dan Pengembangan SDM bidang persandian	1 Jumlah kegiatan sosialisasi tentang keamanan data dan informasi lingkup Pemkab Buleleng	2 kali	
					2 Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan tentang persandian	5 orang	

BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2017 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.